



LAMPUNG SAI

APRIL 2021

EDISI 4

HARI BHAKTI PEMASYARAKATAN

Akselerasi Adaptasi Pemasarakatan PASTI Maju

57TH



LIPUTANKHUSUS

- Sambut Hari Bakti Pemasarakatan Ke-57 Tahun 2021, Kanwil Lampung Lakukan Razia Serentak di UPT Pemasarakatan
- Sinergitas dengan Media, Kanwil Lampung Gelar Media Gathering bersama Jajaran UPT Pemasarakatan
- Kanwil Lampung Gelar Obrolan Peneliti Usung Tema “Implementasi Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan Melalui Jalur Mediasi”

TOPIK UTAMA

- Itjen Lakukan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kanwil Kemenkumham Lampung
- Desk Evaluasi Pembangunan ZI oleh TPI Berakhir, 14 UPT Lulus Menuju Panel TPI
- Sesditjenpas Berikan Penguatan Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM, Sekaligus Meresmikan Musholla Rutan Balam dan Kantin Lapas Narkotika Balam



5 PESAN MENKUMHAM

Prof. Yasonna H. Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D.



- 1 **Utamakan Akuntabilitas
kedepankan Integritas**
- 2 **Bangun Sinergitas serta
manajemen organisasi
yang sehat dan cerdas**
- 3 **Jabatan adalah amanah,
terima dengan tanggung-
jawab dan tinggalkan
jejak yang baik**
- 4 **Kuasai pengelolaan dan
penggunaan anggaran
sesuai prinsip akunta-
bilitas dan transparansi**
- 5 **Perkuat sinergi dan
kolaborasi internal serta
bangun kerjasama tim
yang baik**



icare

e|gov

REFORMASI
HUKUM

PEMAJUAN
HAK ASASI MANUSIA

WAYS THE BEST



Sambutan Kakanwil



Assalamualaikum Wr. Wb.,
Salam Sejahtera untuk kita semua,
Tabik pun...

Puji dan syukur marilah kita senantiasa sampaikan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberikan kesehatan untuk dapat bekerja dan berkontribusi untuk negara. Mengawali Triwulan ke II ini, semangat membangun Zona Integritas menuju WBK dan WBBM akan terus kami tingkatkan dan semakin PASTI. E-Buletin edisi ke-4 ini diharapkan dapat menjadi sarana informasi kepada masyarakat. Sehingga masyarakat luas semakin mengenal dan mendukung Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta mensukseskan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM.

Seperti yang kita ketahui, beberapa lapisan masyarakat sudah mengikuti vaksin covid-19. Meskipun kita sudah divaksin kita masih dapat terpapar, untuk itu marilah untuk tetap menjalankan protokol kesehatan. Semoga pandemi Covid-19 ini segera berlalu.

Akhir kata Wabillahi taufiq wal hidayah,
Wassalamualaikum Wr. Wb.
Salam Pembaharuan!

PELINDUNG

Kepala Kantor Wilayah
DANAN PURNOMO

PENGARAH

Kepala Divisi Administrasi
IDA ASEP SOMARA

Kepala Divisi Yankum dan HAM
NUR ICHWAN

Kepala Divisi Keimigrasian
HASANUDIN

Kepala Divisi Pemasarakatan
FARID JUNAEDI

PENANGGUNGJAWAB

Kepala Bagian Program dan Humas
BASNAMARA

PEMIMPIN REDAKSI

Kasubag Humas RB & TI
ARLISA NOVIRANTONO

EDITOR

ARLISA NOVIRANTONO, DAMBA WIRATAMA, REZA KHAIRUL FITRA, PIJAR PUTRA ARINDA, RIZQI DHITA WARDHANIK, NABIL AN NAFIS

FOTOGRAFER, REDAKSI DAN BERITA

ARLISA NOVIRANTONO, DAMBA WIRATAMA, REZA KHAIRUL FITRA, PIJAR PUTRA ARINDA, RIZQI DHITA WARDHANIK, NABIL AN NAFIS

LAYOUT & DESAIN GRAFIS

NABIL AN NAFIS

Dari Redaksi



Assalamualaikum Wr. Wb

Tabik pun...

Kami segenap redaksi E-Buletin Lampung Sai Menyampaikan puji syukur kepada Tuhan YME yang telah melimpahkan rahmat berupa kesehatan sehingga kami dapat menerbitkan E-Buletin Lampung Sai edisi ke-4 ini dengan lancar. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Kepala Kantor Wilayah, Pejabat Tinggi Pratama dan semua pihak yang telah mendukung tim redaksi untuk berkarya serta terus-menerus melakukan inovasi dan pembaharuan. Pada edisi E-Buletin yang ke-4 ini, kami telah merangkul kegiatan Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung dan Unit Pelaksana Teknis selama satu bulan terakhir. Khusus dalam edisi ini, kami menyajikan liputan mengenai Peringatan Hari Bhakti Pemasarakatan ke-57. Selain itu, sebagai bentuk keikutsertaan dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM, kami juga menyajikan liputan mengenai kegiatan Evaluasi oleh TPI pada satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung.

Kami segenap redaksi mohon maaf apabila terdapat kesalahan tulisan. Semangat pembaharuan akan selalu mengiringi langkah tim redaksi untuk terus melakukan inovasi. Untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat kami butuhkan agar E-Buletin Lampung Sai lebih baik lagi. Salam Pembaharuan! Lampung Sai Pasti Kece! Pasti WBK!

Tim Redaksi.



DAFTAR ISI



HAL. 7

SAMBUT HARI BAKTI PEMASYARAKATAN KE-57 TAHUN 2021, KANWIL LAMPUNG LAKUKAN RAZIA SERENTAK DI UPT PEMASYARAKATAN



HAL. 13

SINERGITAS DENGAN MEDIA, KANWIL LAMPUNG GELAR MEDIA GATHERING BERSAMA JAJARAN UPT PEMASYARAKATAN



HAL. 16

HARI BAKTI PEMASYARAKATAN KE-57 USUNG TEMA “ADAPTASI AKSELERASI, PEMASYARAKATAN PASTI MAJU”

Lapas Perempuan Lampung Ikuti Donor Darah dan Donor Plasma Konvalesen 9

Bakti Sosial Hari Bhakti Pemasyarakatan Ke-57, Lapas Way Kanan berikan bantuan sembako ke Ponpes Al-Barokah 10

PORSENAP LPKA Bandar Lampung Jadikan Ajang Silaturahmi dan Latih Sportivitas 11

One Day One Prison's Product, Dukungan Penuh terhadap Produk Unggulan Narapidana 12

Meski Dini Hari, Kadivpas Tetap Lakukan Monitoring Ke Lapas Kelas II A Metro 15

Kanwil Lampung Laksanakan Vaksinasi Covid-19 Tahap I Bersama Dinas Kesehatan Provinsi Lampung 17

Kanwil Lampung Laksanakan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Fungsional.. 18

Beri Penguatan Tugas dan Fungsi, Kadivmin Persiapkan Rutan Menggala Jelang Penilaian Internal 19

Kakanwil Tinjau Kesiapan Sarpras Pembangunan ZI WBK/WBBM ke Lapas 21

Kelas I Bandar Lampung 21

Penasihat DWP Kanwil Kemenkumham Lampung Tegaskan Arti, Peran dan Kedudukan Perempuan di Era Globalisasi ... 22

Kunjungan Kerja ke Lapas Metro, Kakanwil Harap Bimbingan Kerja Hasilkan PNBK 24



HAL. 27

ITJEN LAKUKAN EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM DI LINGKUNGAN KANWIL KEMENKUMHAM LAMPUNG



HAL. 33

PULIHKAN HAK PENSIUN, DIREKTUR YANKOMAS BERSAMA BUPATI LAMPUNG TIMUR GELAR PERTEMUAN KORBAN PERISTIWA TALANGSARI



HAL. 39

SESDITJENPAS BERIKAN PENGUATAN PEMBANGUNAN ZI MENUJU WBK/WBBM, SEKALIGUS MERESMIKAN MUSHOLLA RUTAN BALAM DAN KANTIN LAPAS NARKOTIKA BALAM

Kanwil Kemenkumham Lampung Ikuti Gelar MUSRENBANG Provinsi Lampung Tahun 2021 Secara Virtual..... 25

Kanwil Lampung Hadiri Telekonferensi Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM 26

Desk Evaluasi Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM oleh TPI Berakhir, 14 UPT Lulus Menuju Panel TPI..... 29

TPI Lakukan Uji Petik di Rutan Kotabumi, Kanim Kotabumi, dan Lapas Kotabumi..... 30

Tim Terpadu Kemenkopolhukam Bersama Ditjen HAM Percepat Proses Penanganan Pemulihan bagi Korban maupun Masyarakat Terdampak Peristiwa Talangsari 31

MKNW Provinsi Lampung Kembali Lakukan Klarifikasi Terhadap Notaris..... 34

Kanwil Kemenkumham Lampung Ikuti Sosialisasi Perpres Nomor 12 Tahun 2021 di Lingkungan Kemenkumham RI..... 35

Kanwil Kemenkumham Lampung Ikuti Ekspos Aplikasi Online Kementerian Hukum dan HAM..... 36

Kanwil Lampung Ikuti Peluncuran Pancaprogram Unggulan Itjen dan Pembukaan Gemar Belajar..... 38

Direktorat Merek dan Indikasi Geografis dan Kanwil Lampung Adakan FGD Terkait Permohonan Merek dan Indikasi Geografis 41

Kanwil Lampung Gelar Obrolan Peneliti Usung Tema "Implementasi Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan Melalui Jalur Mediasi" 43



KARYA PIKIR HAL. 45

Kewenangan dan Tata Kelola Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara

Oleh Erbit Septiawan



Sambut Hari Bakti Pemasyarakatan Ke-57 Tahun 2021, Kanwil Lampung Lakukan Razia Serentak di UPT Pemasyarakatan

Kepala Divisi Pemasyarakatan, Farid Junaedi secara langsung memimpin Razia serentak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bandar Lampung

Dalam Rangka Peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan ke-57 Tahun 2021 yang menjadikan sebuah momentum untuk semakin mengukuhkan komitmennya dalam mencapai tujuan Pemasyarakatan. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung melaksanakan Kegiatan Pencegahan dan Penindakan Keamanan dan Ketertiban Divisi Pemasyarakatan Tahun 2021 dengan melakukan Kegiatan Razia Kamar Hunian Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) secara serentak di Satuan Kerja Lingkungan Kantor Wilayah Lampung. Senin (05/04/2021)

Razia serentak yang dilaksanakan selama 2 (dua) hari, 05-06 April 2021, dimana pada hari pertama ini dilaksanakan di 7 (tujuh) Satuan Kerja antara lain Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Gunung Sugih,

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kota Agung, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kota Agung, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kalian, dan Rumah Tahanan kelas IIB Menggala, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung yang dibagi sebanyak 4 (empat) Tim. Razia serentak ini juga melibatkan Aparat Penegak Hukum seperti Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian di wilayah masing-masing.

Razia serentak ini juga melibatkan Aparat Penegak Hukum seperti Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian di wilayah masing-masing.

Kepala Divisi Pemasyarakatan, Farid Junaedi secara langsung memimpin Razia serentak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bandar Lampung, di waktu

yang bersamaan Kepala Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan, Yuniarto melakukan Razia di Lapas Kalianda, Kepala Sub

Bidang Pelayanan Tahanan, Perawatan Kesehatan, dan Rehabilitasi, Rudi Suwartono melakukan Razia di Lapas dan Rutan Kota Agung, dan Kepala Sub Bidang Pengelola Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan, Alkausar melakukan Razia di Lapas Gunung Sugih.

Kegiatan ini juga dalam rangka Menindaklanjuti Surat Perintah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Perihal Razia Serentak di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Jajaran Divisi Pemasyarakatan Seluruh Indonesia. Direktur Jenderal Pemasyarakatan juga menjelaskan 3 (tiga) Kunci Pemasyarakatan Maju yaitu Deteksi Dini Keamanan dan Ketertiban, Berantas Narkoba dan Sinergitas dengan Aparat Penegak Hukum. •



Razia serentak juga ikut melibatkan Aparat Penegak Hukum lainnya di masing-masing wilayah

Lapas Perempuan Lampung Ikuti Donor Darah dan Donor Plasma Konvalesen



Dalam rangka memperingati Hari Bhakti Pemasarakatan Ke 57 Tahun 2021, Direktorat Jenderal Pemasarakatan menyelenggarakan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran Pemasarakatan untuk meningkatkan komitmen dalam mencapai tujuan pemasarakatan.

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan pada Jumat, 09 April 2021 adalah 'Donor Darah dan Donor Plasma Konvalesen' di Rutan Kelas I Bandar Lampung. Kegiatan Donor Darah dan Donor Plasma Konvalesen dilaksanakan sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena telah sembuh dari Covid-19 dan juga membantu penderita lainnya agar sembuh.

Seiring dengan terus bertambahnya kasus aktif Covid-19, kebutuhan plasma konvalesen yang semakin meningkat, sehingga dibutuhkan penyiapan persediaan kebutuhan Plasma Konvalesen melalui para pendonor. Selain itu, dalam situasi pandemi Covid-19 ini terjadi penurunan jumlah yang signifikan dari masyarakat untuk melakukan donor darah, padahal kebutuhan darah tidak berkurang



Kegiatan Donor Darah dan Donor Plasma Konvalesen diikuti oleh empat UPT yang berada di daerah Way Hui

bahkan cenderung meningkat. Kegiatan Donor Darah dan Donor Plasma Konvalesen diikuti oleh empat UPT yang berada di daerah Way Hui, yaitu Rutan Kelas I

Bandar Lampung, Lapas Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung, Lapas Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung dan Rupbasan Kelas I Bandar Lampung. •

Bakti Sosial Hari Bhakti Pemasyarakatan Ke-57, Lapas Way Kanan berikan bantuan sembako ke Ponpes Al-Barokah



Syarpani berikan bantuan sembako bersama pegawai dan Dharma Wanita Persatuan di Pondok Pesantren Al- Barokah

Sejak awal tahun 2021 hingga saat ini, berita duka datang dari berbagai penjuru Nusantara. Musibah bencana alam datang silih berganti, bahkan menimpa beberapa Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan. Kondisi pandemi Covid-19 menja- di tambahan penderitaan saudara-saudara kita yang terdampak musibah, terutama dalam pe- menuhan kebutuhan primer sebagai seorang manusia. Bakti Sosial ini diselenggarakan untuk membantu saudara-saudara kita yang ter- timpa musibah dengan harapan dapat turut serta memperingan beban mereka. Bakti Sosial yang dilakukan oleh Lapas Kelas IIB Way Kanan Dalam Rangka HUT Pe- masyarakatan ke-57 dalam bentuk pembagian sembako. Demikian disam- paikan Kepala Lapas Way Kanan, Syarpani saat memberikan bantuan sembako bersama pe- gawai dan dharma wanita persatuan di Pondok Pe- santren Al- Barokah, Bumi Baru Way Kanan. Jum'at, (16/04/2021)

Bakti Sosial Dalam Rangka Hari Bhakti Pemasyarakatan Ke-57, dilaksanakan secara serentak pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 di seluruh lapas/ rutan di Indonesia

"Bakti Sosial Dalam Rangka Hari Bhakti Pemasya- rakatan Ke-57, dilaksanakan secara serentak pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 di seluruh lapas/ rutan di Indonesia. Bakti Sosial dilaksanakan dalam bentuk pemberian sembako kepada masyarakat yang membutuhkan di daerah sekitar satuan kerja.

Kami dari Lapas Way Kanan menyalurkan pak- ket sembako bagi puluhan Santri di Pondok Pesantren Al-Barokah, semoga berkah dan bermanfaat", ujar Syarpani.

Sementara itu, Pembina Ponpes Al-Barokah Bumi Baru, Way Kanan, Ba- pak Bahrudin menyampaikan terima- kasih atas bantuan paket sembako dari Lapas Way Kanan. "Terimakasih jazaaku- mullahu khoiron atas bantuannya semoga dicatat dan diberikan pahala sebesar besarnya disisi Allahu subhana wata'ala, Diberkahi umurnya, badannya dan keluarganya, diberkahi hartanya, di- mudahkan semua urusannya bagi keluarga besar Lapas Way Kanan", tutupnya. •

PORSENAP LPKA Bandar Lampung Jadikan Ajang Silaturahmi dan Latih Sportivitas



Mempereingati Hari Bhakti Pemasyarakatan, LPKA Lampung junjung sportivitas pegawai dan anak didik pemasyarakatan. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Bandar Lampung menyelenggarakan Pekan Olahraga dan Seni Narapidana dan Petugas (Porsenap) tahun 2021 dlm rangka menyambut Hari Bhakti Pemasyarakatan, bertempat di Lapangan Utama LPKA Lampung, Sabtu (10/4/2021).



Porsenap yang dilaksanakan dalam rangka menyambut Hari Bhakti Pemasyarakatan Ke-57 yang diperingati setiap tahunnya pada tanggal 27 April ini diikuti oleh Pejabat Struktural, seluruh petugas pemasyarakatan dan perwakilan anak didik pemasyarakatan LPKA Lampung.

Kegiatan dibuka secara formal melalui Upacara Pembukaan Porsenap LPKA Lampung Tahun 2021 bersama seluruh pegawai dan andikpas. Dipimpin oleh Kasi Pengawasan dan Penegakan Disiplin, Andhika Saputra sebagai Inspektur Upacara (Selaku Plh. Kepala Lpka) dlm amanat upacara, Andhika menghimbau kepada seluruh jajaran petugas dan andikpas di LPKA Lampung agar dapat memaknai peringatan Hari

Bhakti Pemasyarakatan dengan setulus hati dan penuh semangat. "Dengan diadakannya kegiatan Upacara Pembukaan Porsenap LPKA Bandar Lampung Tahun 2021 diharapkan seluruh petugas pemasyarakatan dan andikpas dapat mengamalkan semangat dan sportivitas dalam menjalani pembinaan kepada andikpas di Lapas Anak dan masyarakat sekitar," ungkap Andhika dalam sambutannya.

Dalam keadaan cuaca yang cerah mendukung upacara yang berlangsung di lapangan utama LPKA dan Andhika sebagai pejabat struktural membuka secara resmi acara pembukaan Porse-

Porsenap 2021 ini diharapkan dapat menjadi sarana pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan. Selain itu, kegiatan ini menjadi alat pemersatu dan mempererat silaturahmi serta sportivitas antara petugas dan andikpas melalui olahraga dan seni.

nap. Porsenap LPKA Lampung 2021 ini berlangsung dari tanggal 10-12 April 2021. Diramaikan dengan berbagai cabang olahraga bergengsi seperti Leng, gapple, Bulutangkis, dan tenis meja khusus untuk pegawai. Dan Untuk cabang seni, lomba menyanyi dalam tajuk "LPKA Idol", futsal serta permainan kreatif bagi andikpas. Kegiatan yang diikuti oleh petugas dan andikpas tanpa dipungut biaya apapun, alias gratis. •

One Day One Prison's Product, Dukungan Penuh terhadap Produk Unggulan Narapidana

Dalam rangka memperingati Hari Bhakti Pemasyarakatan ke-57, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Gunung Sugih melaksanakan kegiatan One Day One Prison's Product (#Aku-BeliProdukNapi) yg akan dilaksanakan juga Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kantor Wilayah, dan UPT Pemasyarakatan lainnya pada tanggal 26 April 2021.

Pelaksanaan kegiatan ini merupakan dukungan untuk meningkatkan produktivitas WBP melalui pembelian produk. Dengan tujuan tersebutlah kegiatan ini seluruh petugas beserta masyarakat diharapkan ikut andil bagian dalam pembelian dan pemasaran produk unggulan kami berupa minyak sereh dan berbagai produk rajutan seperti konektor hijab, pouch serta tas selempang.

Petugas sangat terlihat antusias dalam berbelanja produk buatan narapidana Lapas Gunung Sugih. Mereka mengakui bahwa produknya memiliki daya tarik pembeli serta memiliki daya saing dengan produk diluar sana." Kami sangat mengharapkan partisipasi publik untuk mendukung program baik ini, mari semuanya untuk membeli dan promosikan produk kami" Ujar Kalapas Gunung Sugih, Denial Arif. •



Petugas terlihat antusias dalam berbelanja produk buatan narapidana Lapas Gunung Sugih.



Sinergitas dengan Media, Kanwil Lampung Gelar Media Gathering bersama Jajaran UPT Pemasyarakatan

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung melaksanakan Media Gathering bersama dengan seluruh jajaran Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan. Senin (12/04/2021) Bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung, Rekan media yang terdiri dari para awak media cetak, media elektronik, serta media online melakukan sesi diskusi di Ruang Coffee Bar Lapas Rajabasa.

Membuka acara, Kepala Kantor Wilayah, Danan Purnomo menyambut para awak media dengan ramah. "Media merupakan mitra kerja bagi kita semua, yang bisa menjadi sarana publikasi kinerja Kementerian Hukum dan HAM di masyarakat" ujar Danan. Danan juga menegaskan bahwa sinergi dengan Media merupakan suatu hal yang dapat membentuk citra yang positif bagi Kementerian Hukum dan HAM. Beberapa informasi terkait dengan kegiatan di Kantor Wilayah, Danan membicarakan tentang MoU yang

telah ditandatangani oleh Universitas di Provinsi Lampung dalam urusan Bimbingan Konseling kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di jajaran UPT Pemasyarakatan. Terakhir Danan berpesan agar seluruh UPT Pemasyarakatan terus membangun sinergitas dengan para media di wilayah masing-masing.

Dilanjutkan dengan Kepala Divisi Pemasyarakatan, Farid Junaedi memberikan beberapa informasi agenda tentang akan diadakannya acara Hari Bhakti Pemasyarakatan di seluruh UPT Pemasyarakatan, yang berupa One Day One Product yang hasilnya nanti akan menjadi Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk Kementerian Hukum dan HAM Lampung.

Selanjutnya, Kepala Lapas Kelas I Bandar Lampung, Maizar menyambut antusias rekan media yang telah hadir serta meminta kritik dan saran kepada media pada sesi diskusi terbuka ini. Antusias rekan media akan diskusi yang dibuka ini terlihat dari beberapa awak media yang mengajukan pertanyaannya. Salah satu pertanyaan yang diajukan Lapas Kelas I Bandar Lampung



“Media merupakan mitra kerja bagi kita semua, yang bisa menjadi sarana publikasi kinerja Kementerian Hukum dan HAM di masyarakat” ujar Danan.

di Bulan Ramadhan pada Lapas Rajabasa dan telah disiapkan juga bagi WBP yang non-muslim tempat pribadi agar tidak mengganggu umat muslim yang menjalankan puasa.

Lampung Post menanyakan bagaimana tanggapan Kanwil Lampung tentang over kapasitas yang ada di jajaran Pemasyarakatan dan apa solusi yang telah dibuat. Hal ini mendapat tanggapan dari Kakanwil yang pada dasarnya jumlah Lapas maupun Rutan yang ada di Kabupaten belum ada semua, namun demikian hal utama adalah dengan Regulasi terkait dengan Aparat Penegak Hukum harus lebih bisa bersinergi dan memilih kasus-kasus yang dipidana. Terakhir Danan berpendapat bahwa terkait dengan perencanaan pembangunan UPT Pemasyarakatan untuk sekarang masih terhambat dengan adanya Pandemi Covid-19 yang alokasi dananya masih diprioritaskan untuk kepentingan pencegahan Covid-19.

Beberapa pertanyaan juga diajukan oleh Tribun Lampung, Antara News, Handal News, dan lainnya, yang mendapat tanggapan positif oleh Kepala Kantor Wilayah, Kepala Divisi Pemasyarakatan serta Kepala Unit Pelaksana Teknis jajaran Pemasyarakatan yang hadir. Sebelum sesi diskusi Para Kepala UPT Pemasyarakatan yang hadir memperkenalkan diri ke awak media. •

terkait dengan Persiapan Lapas untuk menyambut Bulan Ramadhan yang kemudian dijawab oleh Mai-zar tentang pembukaan jam penitipan makanan pada 2-5 Sore hari



Suasana Media Gathering di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung



Meski Dini Hari, Kadivpas Tetap Lakukan Monitoring Ke Lapas Kelas II A Metro



Kadivpas tinjau saat pembagian jatah sahur oleh petugas kepada warga binaan

Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Farid Junaedi mengunjungi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Metro dalam rangka memastikan kondisi keamanan dan ketertiban sekaligus menjamin kelancaran proses pembagian makanan saat berbuka dan sahur pada bulan suci Ramadhan 1442 H. (Jumat, 23/04/21)



Kehadiran Farid beserta rombongan diterima dengan hangat oleh Kepala Lapas, Muchamad Mulyana beserta jajaran Pejabat Struktural yang tiba pada jum'at dinihari. Ia didampingi oleh Mulyana melihat langsung kondisi lingkungan sekitar Lapas, salah satunya adalah dapur. menurut Farid, dapur Lapas Metro ini sudah cukup baik dan layak serta higienis. Kemudian dilanjutkan dengan kontrol keliling blok hunian. Farid berpesan kepada Petugas dan Warga Binaan Pemasyarakatan untuk terus meningkatkan ibadah dan amal baik disepanjang bulan suci Ramadhan. "Bahkan wajib ditingkatkan setiap harinya," kata Farid.

"Jangan sampai pegawai Lapas Metro terlibat penyalahgunaan narkoba, kemudian lakukan deteksi dini terhadap gangguan kamtib, lalu pemberian makan saat berbuka dan sahur bagi Warga Binaan Pemasyarakatan juga harus sesuai standar."
ujar Farid

dilanjutkan dengan peninjauan saat pembagian jatah sahur oleh petugas kepada warga binaan. Setelah selesai, ia beserta rombongan melanjutkan dengan santap sahur bersama jajaran Pejabat Struktural. Dalam kesempatan ini,

Farid juga mencicipi kopi yang menjadi produk unggulan Lapas Metro serta memberikan arahan dan penguatan kepada Pejabat Struktural untuk lebih melakukan pendekatan humanis dan konseling kepada WBP sebagai bentuk pembinaan dan salah satu cara untuk menjaga kondusifitas keamanan dan ketertiban. Mulyana menyampaikan rasa terimakasih atas kunjungan Kadiv Pemasyarakatan. "Terimakasih untuk kunjungan bapak kadivpas ke Lapas Metro ini semoga lapas kita selalu dalam keadaan aman dan berharap semoga kunjungan pak Kadivpas dapat menjalin kerja sama yang prima," ucap Mulyana. •

Hari Bhakti Pemasyarakatan Ke-57 Usung Tema “Adaptasi Akselerasi, Pemasyarakatan PASTI Maju”



Danan Purnomo bersama dengan para Kepala Divisi turut hadir dalam Kegiatan Puncak Peringatan Hari Bhakti Pemasyarakatan (HBP) ke-57.

Memperingati Hari Bhakti Pemasyarakatan ke-57, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung mengikuti Upacara Peringatan secara Virtual yang digelar di Seluruh jajaran Pemasyarakatan se-Indonesia. Senin (27/04/2021)

Bertempat di Aula Kantor Wilayah Lampung, Kepala Kantor Wilayah, Danan Purnomo bersama dengan Kepala Divisi Administrasi, Ida Asep Somara, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Farid Juanaedi, Kepala Divisi Keimigrasian, Hasanudin, dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Nur Ichwan turut hadir dalam Kegiatan Puncak Peringatan Hari Bhakti Pemasyarakatan (HBP) ke-57.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mohammad Mahfud MD menyampaikan tentang menghapus kecenderungan prison oriented atau penyelesaian masalah keja-

hatan selalu berujung pada pemenjaraan. Mahfud menjelaskan tentang arti penjara sebagai ultimatum remidium (upaya terakhir) kini telah bergeser menjadi premium remidium (upaya utama). Kondisi permasalahan yang terjadi pada pemasyarakatan dengan kondisi overcrowded merupakan sebuah bentuk dari efek samping. “Justru yang menjadi masalah utama sebenarnya adalah kebijakan penanganan masalah kriminal kita”, ujar Menko Polhukam.

Pemasyarakatan telah hadir memberikan pelayanan dan pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan, Klien Pemasyarakatan dan masyarakat pada umumnya. Pada Hari Bhakti Pemasyarakatan ke-57 ini, Pemasyarakatan mengusung semangat “Akselerasi Adaptasi, Pemasyarakatan PASTI Maju”. Harapannya agar Pemasyarakatan terus berkembang serta dapat memberikan bimbingan dan pengayoman terbaik bagi bangsa Indonesia •



Kanwil Lampung Laksanakan Vaksinasi Covid-19 Tahap I Bersama Dinas Kesehatan Provinsi Lampung

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung melaksanakan Vaksinasi Covid-19 Tahap I dengan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. Senin (05/04/2021)

Di Aula Kantor Wilayah Lampung, 11 orang Tim Vaksinasi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung melaksanakan kegiatan Vaksinasi dengan beberapa tahapan Pendaftaran Identitas, Pemeriksaan Kesehatan, Screening 1, Screening 2, Vaksinasi, dan Pemberian Kartu Vaksinasi Covid-19. Sebanyak 178 pegawai Kantor Wilayah Lampung mengikuti kegiatan Vaksinasi secara bergantian.

Danan Berharap kegiatan vaksinasi ini mampu untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 dengan membentuk kekebalan kelompok (Herd Immunity), namun demikian diharapkan agar seluruh pegawai yang telah melakukan vaksinasi tetap menjaga protokol kesehatan.

Kepala Kantor Wilayah, Danan Purnomo bersama dengan Kepala Divisi Administrasi, Ida Asep Somara turut memantau jalannya vaksinasi Covid-19. Pelaksanaan vaksinasi ini juga merupakan upaya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung dalam mendukung program pemerintah memutus rantai penyebaran covid-19 di Indonesia. Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). •



Kepala Kantor Wilayah, Danan Purnomo bersama dengan Kepala Divisi Administrasi, Ida Asep Somara memantau jalannya vaksinasi Covid-19



Sebanyak 178 pegawai Kantor Wilayah Lampung mengikuti kegiatan Vaksinasi secara bergantian

Kanwil Lampung Laksanakan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Fungsional



Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung melaksanakan Kegiatan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Fungsional di Lingkungan Kantor Wilayah Lampung, Selasa (06/04/2021)

Pelantikan dan pengambilan sumpah yang dilaksanakan di Aula Kantor Wilayah Lampung ini berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-542.M.HH-542.KP.10.02 Tahun 2021 Tanggal 24 Maret 2021, M.HH-543.KP.10.02 Tahun 2021 Tanggal 24 Maret 2021, M.HH-583.KP.10.02 Tahun 2021 Tanggal 26 Maret 2021, SEK.2-36.KP.03.04 Tahun 2021 Tanggal 24 Maret 2021, SEK.2-38.KP.03.04 Tahun 2021 Tanggal 30 Maret 2021, SEK.2-43.KP.03.04 Tahun 2021 Tanggal 05 April 2021 Tentang Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum Madya, Muda dan Penyesuaian/Inpassing dalam Jabatan Fungsional Pustakawan dan Analis Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Kesepuluh Pegawai yang dilantik antara lain:

1. Nurka Lingga Murti sebagai Penyuluh Hukum Ahli Madya;
2. Fera Agustina sebagai Analis Kepegawaian Muda;
3. AS Saputra sebagai Analis Kepegawaian Pertama;
4. Ester Kartika R Sitanggang sebagai Analis Ke-

pegawaian Muda;

5. Tanti Wahyusari sebagai Analis Kepegawaian Muda;
6. Sisca Mardelaria sebagai Analis Kepegawaian Muda;
7. Nurul Amalia sebagai Pustakawan Ahli Muda;
8. Deddy Nopriadi sebagai Pustakawan Ahli Pertama;
9. Mardhotillah sebagai Penyuluh Hukum Ahli Muda;
10. Indrawati Imron sebagai Penyuluh Hukum Ahli Muda.

Sebagai perpanjangan tangan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia yang ada di daerah, Kepala Kantor Wilayah, Danan Purnomo secara langsung melantik Para Pejabat Fungsional.

Dalam sambutannya, Danan berpesan kepada seluruh pemangku Jabatan Fungsional untuk selalu mengingat 3 (tiga) hal terkait kompetensi, yaitu Pengetahuan (Knowledge), Keterampilan (Skill), dan Etika (Attitude).

Diakhir sambutan, Kakanwil berharap untuk seluruh pegawai yang telah dilantik selain memiliki pengetahuan dan keterampilan juga menjaga etika dalam berorganisasi serta dalam menjalankan tugasnya dapat terus berinovasi dan berkontribusi bagi Kantor Wilayah Lampung agar lebih maju lagi kedepannya. •



Beri Penguatan Tugas dan Fungsi, Kadivmin Persiapkan Rutan Menggala Jelang Penilaian Internal

Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung, Ida Asep Somara, menyambangi Rumah Tahanan Negara Menggala untuk memberikan penguatan tugas dan fungsi satuan kerja pemsyarakatan dalam rangka membangun zona integritas menuju WBK/WBBM jelang penilaian internal. Kedatangan Kadivmin disambut langsung oleh Plh. Kepala Rutan beserta jajaran.

Membuka penguatan, Ida Asep menyampaikan bahwa proses bisnis inti birokrasi adalah pelayanan publik, dan khusus satuan kerja pemsyarakatan, publik yang dilayani tidak hanya masyarakat tapi juga warga binaan, dan bagaimana tingkat kualitas pelayanan publik dapat ditunjukkan melalui tingkat kepuasan publik terhadap layanan tersebut.

Ida Asep berpesan untuk memperbaiki pola dan budaya kerja dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan benar bukan membenarkan kebiasaan-kebiasaan lama yang kurang baik.



Seluruh pegawai Rutan Menggala menyimak arahan Kepala Divisi Administrasi, Ida Asep Somara

"Biasakan yang benar jangan membenarkan kebiasaan dan bekerja dengan cara bukan dengan alasan." Pesan Ida Asep.

Ida Asep mengingatkan bahwa seluruh pegawai di Rumah Tahanan Menggala bukanlah karyawan melainkan pemilik organisasi, karena dalam membangun sebuah zona integritas berawal dari rasa memiliki terhadap organisasi yang dibangun tak hanya oleh segelintir tapi seluruh komponen yang ada.

"Sense of belonging terhadap organisasi perlu dimiliki dan dipelihara. Membangun zona integritas tidak hanya segelintir orang, tapi seluruh komponen yang ada," Sambung Ida Asep. Ida Asep juga mengajak agar menjaga solidaritas di antara pegawai dengan saling melengkapi kekurangan masing-masing dengan potensi dan kelebihan yang dimiliki.

"Jangan mengukur rekan dari kekurangannya, tanamkan prasangka baik bahwa rekan memiliki kelebihan dan diri kitapun memiliki kelemahan maka akan saling melengkapi." Ujar Ida Asep.

Terkait upaya pengendalian peredaran narkoba di lingkungan lapas dan rutan, Ida Asep menerangkan bahwa terdapat 3 hal yang dapat dilakukan, yaitu deteksi dini sebagai upaya preventif, pemberantasan sebagai upaya represif dan kerjasama dengan



"Sense of belonging terhadap organisasi perlu dimiliki dan dipelihara. Membangun zona integritas tidak hanya segelintir orang, tapi seluruh komponen yang ada," Sambung Ida Asep.

instansi dan stakeholder terkait atau sinergitas.

Penggeledahan dan razia adalah upaya pemberantasan yang bersifat represif atau yang dilakukan setelah adanya indikasi pelanggaran, namun tidak serta merta membidik akar pelanggarnya. Deteksi dini dapat mencegah terjadinya pelanggaran dimulai dengan SOP yang jelas dan dijalankan dengan integritas yang tinggi dari seluruh pelaksana. Selain itu Masyarakat dan warga binaan pun perlu diedukasi terkait SOP yang ada untuk menghindari pelanggaran seperti pungli misalnya. Kemudian membangun koneksi dengan berbagai instansi luar sebagai wujud sinergitas dapat memberikan manfaat dimana muaranya adalah tercapainya tujuan organisasi. •



Kakanwil Tinjau Kesiapan Sarpras Pembangunan ZI WBK/WBBM ke Lapas Kelas I Bandar Lampung



Danan Purnomo (tengah) didampingi Kabag Umum, Hadiyanto (kiri) dalam Kunjungannya ke Lapas Kelas I Bandar Lampung diterima langsung oleh Kalapas Maizar (kanan)

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Danan Purnomo didampingi Kepala Divisi Administrasi juga selaku Ketua Tim Program Kerja, Ida Asep Somara dan Kepala Bagian Umum, Hadiyanto melakukan kunjungan kerja ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung guna tinjau kesiapan sarana dan prasarana pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Rabu (07/04/21).

Dalam kunjungannya, rombongan Kakanwil disambut langsung oleh Kepala Lapas Kelas I Bandar Lampung, Maizar bersama jajaran yang langsung melakukan pemeriksaan terkait sarana dan prasarana yang ada guna mendukung pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Sesuai dengan hasil pemeriksaan, sarana dan prasarana pada Lapas Kelas I Bandar Lampung, Tim

menilai sudah memenuhi persyaratan dan terawat dengan baik. Harapannya Lapas Kelas I Bandar Lampung Optimis untuk meraih predikat WBK tahun ini.

Selain peninjauan sarana dan prasarana, Kakanwil juga lakukan koordinasi terkait sinergitas tugas dan fungsi kantor wilayah dengan Lapas Kelas I Bandar Lampung. Hal ini dilakukan guna meningkatkan kinerja Kantor Wilayah dan Satuan Kerja dibawahnya agar semakin PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif) dan dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat luar. •



Penasihat DWP Kanwil Kemenkumham Lampung Tegaskan Arti, Peran dan Kedudukan Perempuan di Era Globalisasi

Pada Rabu (07/04/2021) bertempat di Aula Kantor Wilayah Lampung, Dharmawanita Kemenkumham Lampung menggelar pertemuan dan silaturahmi menjelang Bulan Ramadhan dengan mengangkat tema "Indahnya Silaturahmi". Kegiatan dihadiri oleh Penasihat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kemenkumham Lampung, Endang Danan Purnomo; Ketua Paguyuban Ibu-Ibu Pemasarakatan (PIPAS) Lampung, Wiwiek Farid Junaedi beserta segenap pengurus dan anggota.

Dalam sambutannya Penasihat DWP Kanwil Kemenkumham Lampung, Endang Danan Purnomo menyampaikan bahwa seorang Ibu memiliki peran yang sangat penting untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia guna mendukung daya saing bangsa, karena hakikatnya sebagian besar waktu generasi

muda diawali dengan pendidikan dari rumah. Seorang ibu juga harus mampu menjadi penyemangat sekaligus pendukung bagi suami masing-masing dalam kinerjanya. Istri harus bisa menjadi "penjaga hati suami" agar suami dapat bekerja dengan baik, benar, dan selamat.

Peran dan kedudukan perempuan di era globalisasi ini dimana tantangan yang di hadapi jauh lebih berat sebagai seorang ibu. Seorang ibu harus mampu mendidik, merawat anak, membangun komunikasi dan kebersamaan yang kuat dalam keluarga, karena tugas ibu adalah mempersiapkan generasi muda yang berkualitas, yang tangguh yang akan mampu bersaing di masa depan.

Bahwa dalam mengelola organisasi, Endang melanjutkan, diperlukan kemampuan memimpin, keseimbangan dan pengendalian diri, serta siap menghadapi risiko,

sehingga dalam kepemimpinan, perempuan tidak terus menerus bergelut dengan emosi dan segala sesuatu yang bersifat irrasional. Sebaliknya, perempuan harus bisa berpikir cerdas, logis, percaya diri, komunikatif, dan memiliki karakter yang kuat, sehingga organisasi yang dipimpin pun bisa menjadi organisasi yang kuat dan mandiri.

Endang menghimbau untuk menjadikan pertemuan ini sebagai ajang untuk saling berbagi pengalaman dan inspirasi untuk terus menjaga komitmen dalam meningkatkan mutu rumah tangga masing-masing. Karena dari rumah tangga yang kuat maka akan kuat juga bangsa kita. Mari kita tingkatkan peran kita selaku seorang ibu, disamping peran kita selaku mitra pendamping suami.

Acara dilanjutkan dengan siraman rohani yang disampaikan oleh Dr. Hj. Rika Damayanti, M.Kep., Ns.Sp.Kep.J. seputar persiapan menjalankan ibadah puasa di Bulan Suci Ramadhan dan manfaat puasa terhadap kesehatan jasmani dan rohani. •



Seluruh anggota DWP menyimak arahan Penasihat DWP Kanwil Kemenkumham Lampung, Endang Danan Purnomo



Muchamad Mulyana beserta para jajarannya menerima arahan Kepala Kantor Wilayah di Lapas Metro

Kunjungan Kerja ke Lapas Metro, Kakanwil Harap Bimbingan Kerja Hasilkan PNBP

Dalam rangka Kunjungan kerja ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Metro, Kepala Kantor Wilayah, Danan Purnomo meninjau langsung pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Kerja dan Bimbingan Kemandirian Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Metro. Kamis (08/04/2021) Kepala Lapas Metro, Muchamad Mulyana beserta para jajarannya menyambut antusias kedatangan Kepala Kantor

Wilayah di Lapas Metro. Danan meninjau langsung kegiatan WBP berupa Budidaya Ikan dan Meubelair yang merupakan bagian dari pelatihan di Lapas Metro. Kakanwil sangat mengapresiasi Kegiatan Pelatihan kemandirian yang telah digelar serta dapat menghasilkan sebuah karya dan keahlian bagi Warga Binaan Masyarakat di Lapas Metro. •

Danan berpesan kepada seluruh jajaran di Lapas Metro agar dalam pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Kerja atau Bimbingan Kemandirian dapat berjalan optimal dan konsisten serta dapat berinovasi, sehingga nantinya Lapas Metro dapat menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).





Kanwil Kemenkumham Lampung Ikuti Gelar MUSRENBANG Provinsi Lampung Tahun 2021 Secara Virtual

Berempat di Ruang Klinik Akuntabilitas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung, Kepala Divisi Administrasi, Ida Asep Somara, didampingi Kepala Bagian Program dan Humas, Basnamara, Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan, Gunawan Ali serta jajaran mengikuti kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2021 dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2022 yang digelar secara Virtual Meeting Zoom. Senin (12/04/2021)

Kanwil Kemenkumham Lampung menyaksikan secara virtual Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi didampingi Wakil Gubernur Lampung, Chusnunia Chalim membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Lampung tahun 2021, ditandai dengan pemukulan gong, di Ballroom Hotel Novotel. Dalam sambutannya Arinal

menyampaikan bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2022 kali ini mengusung tema Memantapkan Ekonomi, Kesehatan, dan Peningkatan SDM Berkualitas. Pada kesempatan ini juga, Arinal menyampaikan 2 agenda yaitu rencana pembangunan tahun 2022 dan upaya menjadikan tahun 2022 sebagai

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung berharap dengan diadakan Musrenbang ini rencana pembangunan Provinsi Bandar Lampung dapat berjalan dengan baik dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung siap untuk menjadi bagian di dalamnya

tahun kunci bagi pertumbuhan ekonomi Lampung setelah bebas dari pandemi Covid-19.

Selanjutnya Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Provinsi Lampung, Mulyadi Irsan mengatakan dalam musrenbang ini pihaknya ingin memantapkan pemulihan ekonomi dan kesehatan serta peningkatan sumber daya manusia berkualitas. Musrenbang sebagai forum lintas stakeholder untuk pembangunan dalam rangka penajaman dan penyelesaian penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Provinsi Lampung tahun 2022. •



Kanwil Lampung Hadiri Telekonferensi Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM



Kepala Kantor Wilayah, Danan Purnomo beserta jajaran mengikuti jalannya telekonfrensi Pembangunan ZI

Dalam rangka Persiapan Awal dari Pelaksanaan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2021, Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia melaksanakan Telekonferensi ke seluruh Kantor Wilayah Kemenkumham di Seluruh Indonesia. Kamis (08/04/2021) Bertempat di Ruang Klinik Akuntabilitas Kantor Wilayah Lampung,

Kepala Kantor Wilayah,
Danan

Purnomo didampingi Kepala Divisi Administrasi selaku Ketua Tim Program Kerja, Ida Asep Somara, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM selaku Wakil Ketua Tim Program Kerja, Nur Ichwan mengikuti jalannya telekonferensi yang digelar melalui aplikasi zoom meeting.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Inspektorat Jenderal ini menghadirkan Seluruh Inspektur Wilayah 6 Area Pembangunan dan memberikan pengarahannya dan menjelaskan tentang hal-hal yang perlu diperhatikan agar dapat lolos dalam proses penilaian dan memperoleh predikat WBK/WBBM di Tahun 2021.

Pada kegiatan telekonferensi ini, Inspektur Jenderal melalui Inspektur Wilayah I-IV menjelaskan mengenai alur pelaksanaan evaluasi, dimana evaluasi pertama dilakukan oleh Tim Penilai Internal (TPI) yang kemudian dilanjutkan oleh Tim Penilai Nasional (TPN). Ada 4 (empat) proses yang dilakukan menuju TPN yaitu Persiapan Evaluasi, Evaluasi TPI yang rencananya akan dilakukan di tanggal 12 April hingga 11 Mei 2021 bertempat di Kantor

Wilayah, Penetapan Satuan Kerja Usulan ke TPN, dan Penguatan serta Pendampingan.

Inspektur Wilayah (Irwil) juga menjelaskan 7 (tujuh) Poin faktor-faktor kegagalan usulan satuan kerja menuju WBK dan WBBM di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yaitu terkait Survey Online TPN, Kasus Viral dan Pengaduan Masyarakat, Desk Evaluasi, Kunjungan TPN dan Panel TPN, Fungsi Pembinaan Unit Eselon I, Pembinaan pada satuan kerja masyarakat dan imigrasi, dan Fungsi layanan serta sarana prasarana pada Kantor Wilayah.

Di akhir, Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Razilu menyampaikan bahwa sebagai ASN harus mengubah paradigma dalam menciptakan WBK/WBBM. Bahwa Paradigma WBK itu adalah merupakan Pelaksanaan tugas, fungsi dan peran ASN, Kewajiban penyelenggara negara dan pemerintah, Hak Masyarakat, Bentuk pengabdian kepada Negara, serta salah satu bentuk pengabdian kepada Allah SWT. Harapannya seluruh Satuan Kerja di Lingkungan Kemenkumham siap untuk memperoleh predikat WBK/WBBM Tahun 2021. •





Inspektorat Jenderal Lakukan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/ WBBM di Lingkungan Kanwil Kemenkumham Lampung

Ahmad Rifai beserta Tim Penilai Internal (TPI). Kegiatan diawali dengan sambutan dari Kakanwil, Danan Purnomo. Dalam sambutannya Danan berpesan kepada Tim Pokja baik di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung maupun di jajaran Satuan Kerja untuk selalu berkomitmen dalam pemba-

Berempat di Aula, Inspektorat Jenderal Kemenkumham RI melaksanakan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Kanwil Kemenkumham Lampung pada Selasa (20/04/2021). Hadir langsung Kakanwil, Danan Purnomo didampingi oleh Kepala Divisi Administrasi serta Tim Pokja dari Satuan Kerja (Satker). Turut hadir Inspektur Wilayah I,

“Mari kita ikuti kegiatan ini dengan penuh optimis dan semangat, berikan yang terbaik, serta lakukan perbaikan-perbaikan untuk mendapatkan hasil yang maksimal sehingga dapat lolos penilaian TPI dan diusulkan ke tingkat TPN” ujar Danan.

ngunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

Dilanjutkan dengan arahan dari Inspektur Wilayah I, Ahmad Rifai. Dalam arahnya Ahmad Rifai menjelaskan sekilas tentang time line Pembangunan ZI di Lingkungan Kemenkumham RI dari tahun 2015 hingga 2020. Ahmad Rifi menerangkan dari rentang waktu tersebut usulan Satker



dari TPI ke Tim Penilai Nasional (TPN) terus bertambah setiap tahunnya serta Satker yang mendapat peredikat WBK dan WBBM terus meningkat.

Ahmad rifai menutup arahnya dengan memberikan penjelasan tentang faktor-faktor penyebab kegagalan atau penggugur dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas sekaligus memberikan strategi atau upaya penguatan dan perbaikan dalam menghadapi kendala-kendala tersebut.

Kegiatan berlanjut dengan Desk Evaluasi dari TPI. TPI dari Inspektorat Jenderal yang terbagi menjadi dua tim melakukan Desk Evaluasi dengan masing-masing Satuan Kerja (Satker) yang diawali dengan peragaan Yel-yel serta dilanjutkan dengan Penjelasan tugas dan fungsi oleh Duta Layanan. Dalam desk evaluasi ini Kepala Satker memaparkan proyek perubahan yang ada di satuannya sekaligus menjawab pertanyaan dari TPI dalam sesi wawancara. TPI lalu memberikan masukan dan saran terhadap hal-hal yang perlu diperbaiki maupun ditingkatkan baik dari segi data dukung maupun dari segi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas.

Desk evaluasi yang berlangsung hingga 27 April 2021 mendatang akan mengevaluasi 26 Satker termasuk dengan Kanwil Kemenkumham Lampung. Pada hari pertama ini sebanyak 6 Satker yaitu Lapas Kelas I Bandar Lampung, Lapas Kelas IIA Kalianda, Lapas Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung, Lapas Kelas IIA Kotabumi, Rutan Kelas I Bandar Lampung serta Rutan Kelas IIB Manggala, telah dievaluasi oleh TPI yang selanjutnya akan dilakukan Uji Petik pada tanggal 27 April 2021 mendatang. •



Tim Penilai I dari Inspektorat Jenderal dipimpin oleh Setiawati



Peragaan Yel-yel menjadi salah satu rangkaian Desk Evaluasi



Tim Penilai II dari Inspektorat Jenderal dipimpin oleh Aminullah



Desk Evaluasi Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM oleh TPI Berakhir, 14 UPT Lulus Menuju Panel TPI

Desk Evaluasi pada Satuan Kerja (Satker) di Lingkungan Kantor Wilayah Lampung yang dilakukan Tim Penilai Internal (TPI) Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berakhir. Senin (26/04/2021)

TPI yang terbagi menjadi 2 (dua) tim ini telah melakukan penilaian Desk Evaluasi kepada 27 Satuan Kerja Jajaran Kantor Wilayah Lampung. 14 Satuan Kerja diantaranya berhak Lulus Menuju Panel TPI yaitu Lapas Kelas I Bandar Lampung, Lapas Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung, Lapas Kelas IIA Kalianda, Lapas Kelas IIA Kotabumi, Lapas Kelas IIB Kota Agung, Lapas Kelas IIB Gunung Sugih, Rutan Kelas IIB Manggala, Rutan Kelas IIB Kotabumi, Rutan Kelas IIB Kota Agung, Bapas Kelas II Metro, Kantor Imigrasi Kelas III Non-TPI Kalianda, Kantor Imigrasi Kelas III Non-TPI Kotabumi, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung, dan terakhir Kantor Wilayah Lampung.

Selanjutnya TPI akan melakukan Evaluasi Satuan Kerja atau Uji Petik untuk meninjau persiapan dan kelengkapan Sarana dan prasarana di Unit Pelaksana Teknis yang telah Lulus menuju Panel TPI. Terinformasi bahwa, besok TPI akan menuju Lapas Kelas I Bandar Lampung, Lapas Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung, dan Lapas Kelas IIA Kalianda. •

14 Satuan Kerja diantaranya berhak Lulus Menuju Panel TPI yaitu Lapas Kelas I Bandar Lampung, Lapas Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung, Lapas Kelas IIA Kalianda, Lapas Kelas IIA Kotabumi, Lapas Kelas IIB Kota Agung, Lapas Kelas IIB Gunung Sugih, Rutan Kelas IIB Manggala, Rutan Kelas IIB Kotabumi, Rutan Kelas IIB Kota Agung, Bapas Kelas II Metro, Kantor Imigrasi Kelas III Non-TPI Kalianda, Kantor Imigrasi Kelas III Non-TPI Kotabumi, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung, dan terakhir Kantor Wilayah Lampung.



Foto Bersama antara Tim Penilai dengan Lapas Kelas IIB Way Kanan

TPI Lakukan Uji Petik di Rutan Kotabumi, Kanim Kotabumi, dan Lapas Kotabumi



Tim Penilai Internal Inspektorat Jenderal saat melakukan uji petik di Kantor Imigrasi Kelas III Kotabumi

Tim Penilai Internal Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melakukan Evaluasi Satuan Kerja (Uji Petik) ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) Jajaran Kantor Wilayah Lampung untuk meninjau langsung sarana dan prasarana Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Sabtu (24/04/2021). TPI yang beranggotakan 4 (empat) pegawai langsung menuju ke Kantor Imigrasi Kelas III Non-TPI Kotabumi. Didampingi oleh Kepala Bagian Program dan Humas, Basnamara, TPI yang di ketuai oleh Raden Bagus Wasito Utomo meninjau bagian luar dan dalam dari Kantor Imigrasi. Bagus menilai secara keseluruhan Kantor Imigrasi sudah melengkapi unsur-unsur dari sarana dan prasarana penunjang pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

Tim berlanjut ke Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kotabumi, Mukhlisin Fardi selaku Kepala Rutan Kotabumi menyambut baik kedatangan dari TPI. Mukhlisin

menerangkan perubahan-perubahan sarana dan prasarana di dalam Rutan Kotabumi terus berjalan, hal ini demi menunjang Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM di Rutan Kotabumi.

“Untuk saat ini Inovasi Pelayanan Publik baru dikembangkan 1 (satu) buah aplikasi, selanjutnya kami akan mengembangkan aplikasi yang bisa membuat Peningkatan Pelayanan Publik di Rutan Kotabumi” pungkas Karutan Kotabumi

Kunjungan diakhiri dengan menuju ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kotabumi, Endang Lintang Hardiman selaku Kepala Lapas Kotabumi menyambut dengan antusias kedatangan Tim Penilai. Aminullah salah satu dari TPI yang berkunjung menjelaskan bahwa potensi yang ada di Lapas Kotabumi untuk meraih WBK sangat memungkinkan. Aminullah bersama dengan Kepala Lapas Kotabumi membicarakan hal-hal apa saja yang perlu dibenahi demi dapat terwujudnya Pembangunan Zona Integritas. •





Tim Terpadu Kemenkopolkham Bersama Ditjen HAM Percepat Proses Penanganan Pemulihan bagi Korban maupun Masyarakat Terdampak Peristiwa Talangsari

Bandar Lampung, Rabu (21/04/2021), bersama dengan tim terpadu Kemenkopolkham, Direktorat Jenderal HAM tengah mempercepat proses penanganan pemulihan bagi korban maupun masyarakat terdampak peristiwa Talangsari. Untuk itu, tim terpadu menggelar rapat koordinasi bersama dengan BKN dan Pemkab Lampung Timur.

Rapat yang dipimpin Direktur Yankomas, Pagar Butar Butar, ini fokus membahas pemulihan hak pensiun ASN salah seorang korban peristiwa Talangsari. Mengawali rapat, Pagar mengapresiasi kesediaan pihak BKN dan Pemkab Lampung Timur untuk duduk bersama dengan tim terpadu

guna mencari solusi bagi pemulihan hak korban.

"Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan bersama ini berhasil untuk memberikan pemulihan bagi salah satu korban yang kita ketahui merupakan seorang ASN," ujar Pagar

Upaya pemulihan bagi korban Talangsari, kata Pagar, menjadi semakin penting saat ini. Pasalnya, publik menantikan hasil konkret dari upaya yang tengah dikerjakan pemerintah dalam penanganan dugaan pelanggaran HAM berat melalui jalur non yudisial.

Lebih lanjut, Pagar berharap agar dalam proses pemulihan yaitu hak pensiun bagi korban dapat dilakukan secara khusus. Mengingat, data dukung atau pun berkas yang bersangkutan kemungkinan tidak bisa diproses dengan mekanisme pada umumnya.

"Karena itu, saya mengajak mari kita satukan langkah untuk mencari solusi terkait persoalan, kendala, atau pun tantangan dalam memulihkan korban khususnya terkait hak pensiun ini," terangnya. Dalam rapat ini, baik BKN dan BKD Lampung Timur berdiskusi secara mendalam tentang apa saja yang diperlukan untuk memberikan kembali hak pensiun bagi korban. Kedua belah

Upaya pemulihan bagi korban Talangsari menjadi semakin penting saat ini. Pasalnya, publik menantikan hasil konkret dari upaya yang tengah dikerjakan pemerintah dalam penanganan dugaan pelanggaran HAM berat melalui jalur non yudisial.

Sejalan dengan apa yang disampaikan Pagar Butar Butar, baik BKN maupun BKD Lampung memahami adanya sejumlah hal yang perlu dilakukan secara khusus dalam pemulihan bagi ASN yang menjadi korban Peristiwa Talangsari tersebut.

pihak sepakat untuk mendukung kinerja tim terpadu guna melakukan pemulihan kepada yang bersangkutan.

Sejalan dengan apa yang disampaikan Pagar Butar Butar, baik BKN maupun BKD Lampung Timur memahami adanya sejumlah hal yang perlu dilakukan secara khusus dalam pemulihan bagi ASN yang menjadi korban Peristiwa Talangsari tersebut.

Dalam forum ini, pihak BKD Lampung Timur menyatakan kekurangan berkas atau data dukung untuk pemenuhan administrasi hak pensiun ASN dimaksud akan dituntaskan pada Jumat minggu ini.

"Jika berkasnya sudah tuntas minggu ini, kami optimis sebelum lebaran hak pensiun bagi yang bersangkutan dapat diterima," tutur pejabat BKN yang hadir pada rapat siang ini.

Selain pejabat dari BKN dan BKD Lampung Timur, Kadiyan-kumHAM Kanwil KemenkumHAM Lampung juga turut mengikuti jalannya rapat koordinasi yang digelar di Hotel Golden Tulip ini.

Rencananya sebagai bentuk tindaklanjut pertemuan pada hari ini, esok hari Pagar Butar Butar didampingi para Kasubdit Direktorat Yankomas bersama dengan tim terpadu dari Kemenkopolkam dan BKN akan melakukan pemulihan audiensi dengan Bupati Lampung Timur. •



Direktur Yankomas Pagar Butar Butar serta tim terpadu menggelar rapat koordinasi bersama dengan BKN dan Pemkab Lampung Timur.

Pulihkan Hak Pensiun, Direktur Yankomas bersama Bupati Lampung Timur Gelar Pertemuan dengan Korban Peristiwa Talangsari



Kamis (22/04/2021), bertempat di Kantor Bupati Lampung Timur, Direktur Yankomas, Pagar Butar memimpin Tim Terpadu, Pejabat BKN, Taspen Lampung serta Bupati Lampung Timur gelar pertemuan dengan korban peristiwa Talangsari. Turut hadir dari Kanwil Kemenkumham Lampung, Kepala Bidang HAM Rina Anggraeny didampingi oleh Kepala Sub Bidang Pemajuan Hak Asasi Manusia, Ferie Irza Irawan. Dalam dialog ini juga dihadiri oleh pejabat di daerah seperti Kabag Kesbangpol dan Kepala BKD Lampung Timur.

Pertemuan tersebut bertujuan untuk mengembalikan hak pensiun dari korban peristiwa Talangsari yang juga merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN). Tim terpadu membantu korban dalam memenuhi dokumen syarat untuk mendapatkan hak pensiun. Pagar menerangkan jika upaya tersebut merupakan hasil koordinasi yang baik antara Tim Terpadu pemerintah dengan instansi terkait di daerah serta kerjasama dengan Bupati Lampung Timur.



Direktur Yankomas, Pimpin Tim Terpadu, serta Bupati Lampung Timur gelar pertemuan dengan korban peristiwa Talangsari

Pagar menambahkan, keberhasilan ini juga merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah dalam menangani pemulihan bagi korban maupun masyarakat terdampak dugaan pelanggaran HAM berat khususnya dalam hal ini peristiwa Talangsari.

Bupati Lampung Timur, Dawam Rahardjo menegaskan kembali jika keberhasilan yang bersangkutan untuk mendapatkan kembali hak pensiunnya tak lepas koordinasi yang baik antara pusat

dan daerah. Dalam dialog dengan korban yang seorang guru tersebut, Dawam tak segan untuk memberikan kontak pribadinya dan mempersilahkan korban agar tak sungkan untuk mengunjungi rumah dinas bupati bila ada hal yang perlu disampaikan.

Dalam kesempatan ini korban mengapresiasi kinerja Tim Terpadu yang selama ini telah intens berkomunikasi dengannya, sehingga upaya pemulihan hak pensiunnya berhasil dilakukan. •

MKNW Provinsi Lampung Kembali Lakukan Klarifikasi Terhadap Notaris



Tim Pemeriksa terdiri dari 3 unsur, Pemeriksaan dipimpin Zul April, S.H., dari Unsur Notaris sebagai Ketua merangkap Anggota, Danan Purnomo, S.H., M.Si., dari Unsur Pemerintah sebagai Anggota, Prof. Maroni dari Unsur Akademisi sebagai Anggota dan Sekretaris Tim Thomas Meitian, S.H., M.H.

Bertempat di Legal Drafter Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung. Rabu (07/04/2021). Terkait Permohonan persetujuan pemanggilan sebagai saksi oleh Unit 2 Subdit 4 Ditreskrimum Kepolisian Daerah Metro Jaya, Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) Provinsi Lampung melakukan panggilan terhadap Notaris untuk dimintai klarifikasi.

Beberapa Pertanyaan diajukan Tim Pemeriksa kepada Notaris terkait dengan prosedur dalam pembuatan akta yang dibuat oleh Notaris, apakah prosuder yang dilaksanakan telah sesuai dengan Undang-undang Tentang Jabatan Notaris dan peraturan perundang-undangan lainnya

Tim Pemeriksa terdiri dari 3 unsur, Pemeriksaan dipimpin Zul April, S.H., dari Unsur Notaris sebagai Ketua merangkap Anggota, Danan Purnomo, S.H., M.Si., dari Unsur Pemerintah sebagai Anggota, Prof. Maroni dari Unsur



Akademisi sebagai Anggota dan Sekretaris Tim Thomas Meitian, S.H., M.H.

Klarifikasi diawali oleh Tim Pemeriksa MKNW berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua MKNW Provinsi Lampung. Beberapa Pertanyaan diajukan Tim Pemeriksa kepada Notaris terkait dengan prosedur dalam pembuatan akta yang dibuat oleh Notaris, apakah prosuder yang dilaksanakan telah sesuai dengan Undang-undang Tentang Jabatan Notaris dan peraturan perundang-undangan lainnya. Sehingga Kepolisian

Daerah Metro Jaya harus mengirimkan surat permohonan untuk menghadirkan Notaris sebagai saksi dalam proses penyidikan yang sedang dilakukan oleh Penyidik Unit 2 Subdit 4 Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

Pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa MKNW dilanjutkan dengan Rapat Pleno MKNW Provinsi Lampung yang dipimpin langsung oleh Ketua MKNW, Danan Purnomo, S.H., M.Si., dihadiri juga oleh Ayi Ruhiyat, S.H. dan Chairul Anom, S.H. selaku anggota MKNW Provinsi Lampung. •



Kakanwil, Danan Purnomo beserta jajaran ikuti Sosialisasi Perpres No. 12 Tahun 2021 secara virtual

Kanwil Kemenkumham Lampung Ikuti Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 di Lingkungan Kemenkumham RI

Bertempat di Ruang Klinik Akuntabilitas, Kanwil Kemenkumham Lampung ikuti Sosialisasi Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 terkait Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI secara virtual pada (06/04/2021). Turut hadir Kakanwil, Danan Purnomo didampingi oleh Kepala Divisi Administrasi, Ida Asep Somara; Kepala Bagian Umum, Hadiyanto; Kepala Sub Bagian Pengelolah Keuangan, & Barang Milik Negara, Arya Dwi Jayanti beserta JFT Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa.

Kegiatan diawali dengan laporan dari Kepala Biro Barang Milik Negara (BMN), Iwan Santoso. Dalam laporannya Iwan menyampaikan jika kegiatan ini bertujuan untuk memberikan penguatan dan peningkatan kapasi-

tas pemahaman bagi para pelaku pengadaan di Lingkungan Kemenkumham atas kebijakan baru tentang pengadaan barang/jasa pemerintah Perpres No.12 Tahun 2021.

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari pada tanggal 6-7 April 2021 ini menghadirkan narasumber dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Ikatan Ahli Pengadaan Barang/Jasa serta Mudjisantosa Training and Consulting.

Selanjutnya, arahan dari Sekretaris Jenderal Kemenkumham RI, Andap Budhi Reviyanto. Dalam arahannya Andap berpesan

kepada peserta untuk bersungguh-sungguh dalam mempelajari regulasi yang telah ada lalu mempelajari apasaja perubahan yang ada di Perpres No.12 Tahun 2021.

"Pahami dengan baik, implementasikan dengan baik di kantor kita, di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM," pungkask Andap.

Pemberian materi pada hari pertama ini dibagi menjadi dua sesi. Pada Sesi pertama disampaikan materi terkait Sosialisasi Perpres No.12 Tahun 2021 dengan narasumber dari LKPP. Adapun

Dalam arahannya Andap berpesan kepada peserta untuk bersungguh-sungguh dalam mempelajari regulasi yang telah ada lalu mempelajari apasaja perubahan yang ada di Perpres No.12 Tahun 2021.

pada sesi kedua dengan narasumber dari praktisi dari Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), Baihaki menyampaikan materi terkait perencanaan pengadaan, pengadaan secara swakelola, pengadaan yang dikecualikan dan tender internasional. Kegiatan akan berlanjut esok, 7 April 2021 dengan pemberian materi dari praktisi Mudjisantosa Training and Consulting dari praktisi UKPBJ Pemerintah Provinsi Bengkulu.



Kanwil Kemenkumham Lampung Ikuti Ekspos Aplikasi Online Kementerian Hukum dan HAM

Berempat di Ruang Klinik Akuntabilitas, Kanwil Kemenkumham Lampung Ikuti Ekspos Aplikasi Kemenkumham Online secara virtual pada Kamis (01/04/2021). Turut hadir Kepala Divisi Administrasi, Ida Asep Somara; Kepala Divisi Imigrasi, Hasanudin dan Kepala Divisi Pemasarakatan, Farid Junaedi didampingi oleh Kepala Bagian Program dan Humas, Basnamara beserta para pejabat struktural. Sementara ditempat terpisah Kakanwil, Danan Purnomo dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Nur Ichwan mengikuti jalannya acara secara virtual dari Yogyakarta bersamaan dengan kegiatan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Kegiatan yang dihadiri oleh Unit Pusat dan seluruh Kantor Wilayah ini diawali dengan Arah-an Sekretaris Jenderal Kemen-

kumham, Andap Budhi Revianto. Sebagai portal aplikasi layanan publik kumham, semua aplikasi layanan publik Kemenkumham nantinya akan terintegrasi di aplikasi ini. Hal tersebut bertujuan agar lebih memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan kumham.

“Layanan aplikasi ini harapannya memudahkan masyarakat untuk mendapat pelayanan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia,” kata Andap.

Saat ini terdapat 682 aplikasi yang dihasilkan di lingkungan Kemenkumham baik di Unit Pusat, Kantor Wilayah, maupun Unit Pelaksana Teknis (UPT). “682 Aplikasi ini harus terintegrasi, ini sejalan dengan kebijakan Bapak presiden

yang mengadopsi perkembangan lingkungan strategis secara global,” imbuh Andap. Tentunya integrasi tersebut memperhatikan aspek keamanan, kemanfaatan, efektifitas dan efisiensi.

Tak lupa Andap juga berpesan untuk mempersiapkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dengan baik. “Yang WBK dapat naik ke WBBM dan yang belum sama sekali dapat naik ke WBK,” ujar Andap.

Kegiatan berlanjut dengan arahan dari Staf Khusus Menkumham, Fajar Lase terkait pelaksanaan Integrasi dalam Aplikasi Online Kemenkumham. Dalam arahnya Fajar menjelaskan jika melalui Aplikasi Online Kemenkumham ini masyarakat dapat mengakses seluruh layanan hanya dengan sekali login (single sign on).

Dijelaskan pula jika nantinya Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) akan melakukan verifikasi pada seluruh aplikasi layanan publik yang nantinya akan diintegrasikan ke Aplikasi Online Kemenkumham. Kantor Wilayah

mempunyai tugas untuk meng-himpun data terkait semua aplikasi yang ada di wilayah baik aplikasi unggulan atau aplikasi dari satker untuk diusulkan yang nantinya akan diverifikasi oleh Pusdatin .

Tahap verifikasi awal dilakukan pada aplikasi pelayanan publik Unit Eselon I. Bersamaan dengan itu Kantor Wilayah mengusulkan aplikasi yang ada di wilayahnya sekaligus melakukan verifikasi aplikasi yang ada di Unit Pelaksana Teknis. UPT dapat mengusulkan aplikasinya ke Kantor Wilayah

Verifikasi aplikasi di wilayah tersebut memperhatikan kesesuaian aplikasi dengan business process unit utama. Selain itu proses verifikasi juga memperhatikan aspek teknologi, keamanan, fungsionalitas dan penggunaannya.

"Kita berharap Aplikasi Online Kemenkumham dapat segera di-realisasikan dan akan dilaunching oleh Menteri Hukum dan HAM pada waktunya," pungkas Fajar. •



Kakanwil, Danan Purnomo dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Nur Ichwan mengikuti jalannya acara secara virtual dari Yogyakarta



Kanwil Lampung Ikuti Peluncuran Pancaprogram Unggulan Itjen dan Pembukaan Gemar Belajar



Kakanwil, Danan Purnomo beserta jajaran ikuti Peluncuran Pancaprogram Unggulan Itjen dan Pembukaan Gemar Belajar secara virtual

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Danan Purnomo didampingi Kepala Divisi Administrasi, Ida Asep Somara; Kepala Bagian Program dan Humas, Basnamara; Kasubid Humas, Noviriantono; dan jajarannya ikuti Peluncuran Pancaprogram Unggulan Inspektorat Jendral dan Pembukaan Program Gemar Belajar secara virtual melalui zoom di ruang Akuntabilitas hari ini, Senin (05/04/21).

Kegiatan yang dihadiri secara offline oleh Prof. Edward Omar Sharif Hiariej, Wakil Menteri Hukum dan HAM mewakili Menteri Hukum dan HAM;

Faisal,
Di-

rektur Hankam mewakili Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP); Sekretaris Jenderal Kemenkumham Andap Budhi Revianto; Inspektur Jenderal, Razilu; Asep Kurnia, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemenkumham; Para Pimpinan Tinggi Pratama; Pejabat Administrator dan Pejabat Fungsional Madya di Lingkungan Inspektorat Jenderal serta diikuti secara virtual melalui Zoom oleh Para Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM, Para Sekretaris Unit Eselon I, Para Kepala Biro, Kepala Pusat Data dan Informasi, Para Kepala Kantor Wilayah, dan seluruh Pejabat/Pegawai Inspektorat Jenderal.

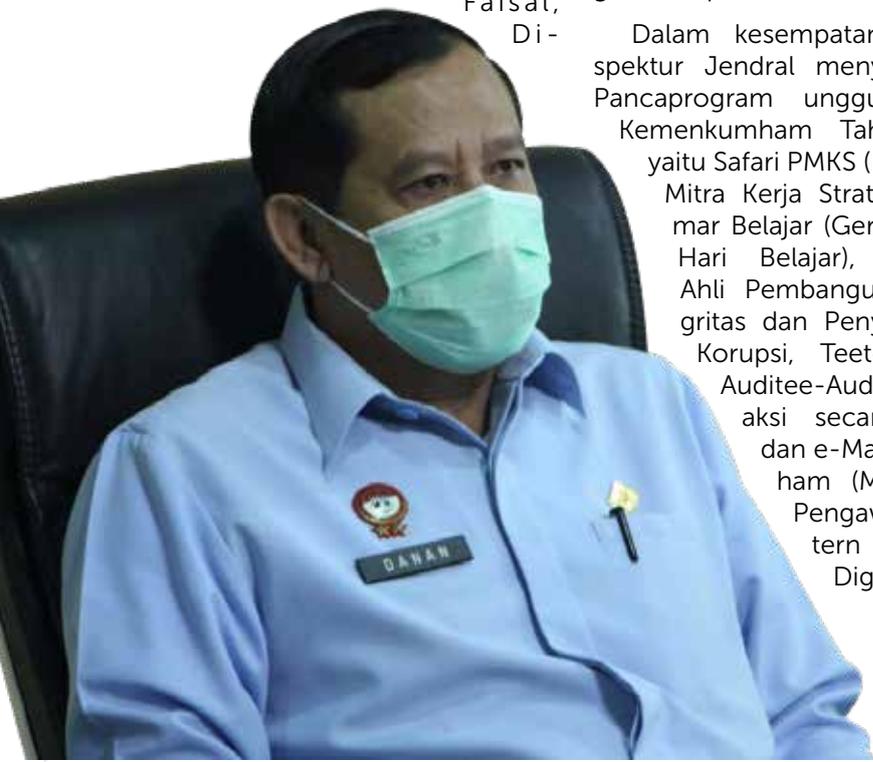
Dalam kesempatan ini, Inspektur Jendral menyampaikan Pancaprogram unggulan Itjen Kemenkumham Tahun 2021 yaitu Safari PMKS (Penguatan Mitra Kerja Strategis), Gemar Belajar (Gerakan Lima Hari Belajar), Sertifikasi Ahli Pembangunan Integritas dan Penyuluh Anti Korupsi, Teator Virtual Auditee-Auditor interaktif secara virtual, dan e-Mawas Kumham (Manajemen Pengawasan Intern Berbasis Digital). Sela-

in itu Smart APIP juga digadangkan akan mewujudkan Keagungan Kementerian Hukum dan HAM.

Selanjutnya, dilakukan pembacaan Ikrar Panca Komitmen yang dipimpin oleh Inspektur Wilayah IV, Luluk Ratnaningtyas, diikuti oleh semua peserta kegiatan. Acara dilanjutkan dengan penyerahan secara simbolis sertifikat FGD (Focus Group Discussion) Persiapan Evaluasi Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kemenkumham tahun 2021.

Prof. Edward juga menyampaikan apresiasinya kepada Inspektur Jendral atas respon cepat mengenai arahan dari Menteri Hukum dan HAM pada saat pelantikan. Selain itu, Sekretaris Jendral juga menyampaikan tujuan kegiatan ini yang menjadi perhatian penting yaitu peningkatan kompetensi dan kapasitas karena kemenkumham sebagai organisasi modern hal tersebut selalu dinamis. •

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan kapabilitas APIP Kemenkumham akan meningkat sehingga kinerja Kemenkumham akan semakin PASTI.



Sesditjenpas Berikan Penguatan Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM, Sekaligus Meresmikan Musholla Rutan Balam dan Kantin Lapas Narkotika Balam



Foto bersama dengan Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan usai penguatan Pembangunan ZI

Kamis (29/04/2021) Dalam rangka Penguatan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Heni Yuwono beserta jajaran memberikan arahan kepada seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung. Kepala Divisi Pemasyarakatan, Farid Junaedi beserta jajaran hadir dalam Kegiatan Penguatan yang diberikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Dalam penyampaian yang bertempat di Rumah Tahanan Negara Kelas I Bandar Lampung, Heni Yuwono memberikan kiat-kiat serta penguatan tentang materi yang berkaitan dengan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM. Tak



Kakanwil, Danan Purnomo dampingi Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Heni Yuwono saat peresmian Musholla Rutan Balam

lupa Heni menekankan tentang pentingnya strategi-strategi untuk meraih predikat WBK/WBBM yaitu dengan terus bekinerja baik, semangat yang tinggi, dan ikhlas serta dengan komitmen yang baik pula.

Menjelang sore hari, Kepala Kantor Wilayah, Danan Purnomo turut hadir pula dalam acara peresmian Mushola Al-Ikhlash Rutan Kelas I Bandar Lampung dan Kantin "Koen's Mart" Lapas Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung. Dalam sambutannya, Danan menyampaikan bahwa peraih predikat WBK/WBBM hanyalah sebagai simbol saja, yang terpenting adalah bagaimana insan pengayoman di Lingkungan Kantor Wilayah Lampung bisa merubah pola pikir serta budaya kerja untuk meraih WBK/WBBM itu sendiri.

Acara ditutup dengan pemotongan pita secara simbolis oleh Heni Yuwono selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di Mushola Al-Ikhlash Rutan Kelas I Bandar Lampung dan Kantin "Koen's Mart" Lapas Narkotika Kelas IIA Bandar Lampung oleh Heni Yuwono selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang disaksikan pula oleh Kepala Kantor Wilayah Lampung, Danan Purnomo. •



Heni Yuwono selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Resmikan Mushola Al-Ikhlash





Direktorat Merek dan Indikasi Geografis dan Kanwil Lampung Adakan FGD Terkait Permohonan Merek dan Indikasi Geografis

Dalam rangka memberikan sosialisasi serta berdiskusi terkait permohonan merek dan indikasi geografis, Direktorat Merek dan Indikasi Geografis melakukan kunjungan kerja ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung, Kamis (29/04/2021)

Bertempat di Aula Kantor Wilayah Lampung, Direktur Merek dan Indikasi Geografis, Nofli beserta Kepala Subdirektorat Permohonan dan Publikasi¹, Adelchandra, Kepala Seksi Administrasi Permohonan dan Klasifikasi, Erick Christian Fabrian Siagian, Kepala Seksi Sertifikasi¹, Semy Teddy Rory, dan rombongan disambut antusias dengan para peserta sosialisasi dalam hal ini para penyuluh hukum yang ada di lingkungan Kantor Wilayah Lampung.

Kepala Kantor Wilayah, Danan Purnomo didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Nur Ichwan menyambut keda-



Penyerahan sertifikat merek dari Direktur Merek dan Indikasi Geografis, Nofli kepada Kakanwil, Danan Purnomo

tangan rombongan dari Direktorat Merek dan Indikasi Geografis. Dalam sambutannya, Danan menyampaikan kita sebagai insan pengayoman harus mendukung peningkatan dan pemulihan perekonomian di Indonesia, hal itu dengan mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya merek dagang. Danan menjelaskan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berkontribusi dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kemenkumham walaupun di masa pandemic Covid-19.



Nofli menjelaskan bahwa sosialisasi yang diberikan kepada para penyuluh hukum yang notabene merupakan corong publikasi tentang peraturan yang ada di Kementerian Hukum dan HAM mampu dimanfaatkan secara luas, sehingga masyarakat mengetahui pentingnya tentang pendaftaran merek



Selanjutnya, Dir. Merek dan IG, Nofli mengucapkan terima kasih atas sambutan yang didapatkan dari Danan selaku Kepala Kantor Wilayah. Nofli juga meminta agar dalam sesi diskusi ini, kendala-kendala yang dihadapi seperti Sumber Daya Manusia (SDM), Sarana dan Prasarana, Teknologi Informasi, Aplikasi Permohonan dan lainnya bisa menjadi masukan bagi Direktorat Merek dan Indikasi Geografis.



Acara dilanjutkan dengan penyerahan sertifikat merek dan dilanjutkan dengan Forum Diskusi bersama. Harapannya setelah dengan adanya Sosialisasi dan Forum Diskusi, penerimaan permohonan merk dan indikasi geografis yang ada di Lingkungan Kantor Wilayah Lampung bisa dapat terus meningkat. •

Kanwil Lampung Gelar Obrolan Peneliti Usung Tema “Implementasi Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan Melalui Jalur Mediasi”



Dalam rangka kegiatan Sosialisasi Hasil Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia Melalui Diskusi Daring Obrolan Peneliti (OPini) Tahun 2021, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Republik Indonesia memberikan petunjuk dan arahan kepada Kantor Wilayah di seluruh Indonesia untuk melaksanakan Sosialisasi Penelitian di wilayah masing-masing. Jum'at (30/04/2021)

OPini Kantor Wilayah Lampung mengusung tema "Implementasi Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan Melalui Jalur Mediasi" turut mengundang 3 (tiga) narasumber yaitu Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung, HS Tisnanta, Kepala Sub Bagian Non Litigasi dan HAM Biro Hukum Setda Provinsi Lampung, Yusnilli dan secara Virtual, Peneliti Madya Balitbangkumham, Nevey Varida Ariani.

Penyuluh Hukum Ahli Madya, M Zuhri selaku Moderator memandu jalannya acara, dibuka dengan sambutan dari Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Nur Ichwan dan dilanjutkan dengan sambutan dari Sekretaris Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Yayah Mariani.

Dimulai dengan narasumber yang pertama, Yusnili menjelaskan tentang Efektivitas Biro Hukum Provinsi Lampung Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah dimana Biro Hukum mempunyai tugas untuk menyiapkan bahan perumusan penyusunan produk hukum daerah provinsi, Pembinaan dan pengawasan produk hukum kabupaten/kota, Bantuan hukum, Dokumentasi dan Informasi Hukum, Penyuluhan hukum dan Pemajuan Hak Asasi Manusia (HAM) didaerah. Kasubag Non Litigasi dan HAM Biro Hukum Setda Provinsi Lampung dalam hal ini

juga menjelaskan upaya hukum disharmoni Peraturan Perundang-Undangan dengan Jalur Litigasi (Judicial Review/ Uji Materil) maupun dengan Jalur Non Litigasi (Mediasi).

Menurut Tisnanta upaya dalam pencegahan disharmoni dapat dilakukan dengan cara penyusunan program legislasi, persiapan pembentukan rancangan peraturan perundang-undangan, Kerjasama antar Lembaga, dan arti penting naskah akademik.

Selanjutnya narasumber yang kedua, HS Tisnanta menjelaskan tentang apa saja sebab terjadinya disharmoni, akibat disharmoni, serta jalan keluar dari terjadinya disharmoni. Menurut Tisnanta upaya dalam pencegahan disharmoni dapat dilakukan dengan cara penyusunan program le-

gisasi, persiapan pembentukan rancangan peraturan perundang-undangan, Kerjasama antar Lembaga, dan arti penting naskah akademik.

Narasumber terakhir, Nevey Varida memberikan penjelasan bahwa secara normatif, Kementerian dan Lembaga di bawah Presiden Memiliki Otonomi Masing-masing sehingga Nampak Ego Sektoral dari Produk Perundang-undangan yang dihasilkan. Namun Secara Substansial, permenkumham nomor 2 tahun 2019, Mekanisme Mediasi Merupakan Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Merupakan Suatu Terobosan Hukum, Jalan Tengah, Atau Sikap Responsif Hukum Progresif Yang Berkembang di Negara Demokrasi.

Di akhir kegiatan diadakan sesi tanya jawab, peserta tampak sangat antusias bertanya kepada para narasumber. Menutup acara Nur Ichwan memberikan ucapan terimakasih kepada seluruh narasumber. "Kegiatan ini sangat baik sekali sangat menambah wawasan dan ilmu kepada seluruh peserta, dan berharap kedepannya akan ada lagi kegiatan seperti ini. Dikarenakan kegiatan seperti ini sangat dibutuhkan di seluruh provinsi" tutup Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Lampung. •



Sambutan dari Sekretaris Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Yayah Mariani secara Virtual



Yusnili menjelaskan tentang Efektivitas Biro Hukum Provinsi Lampung Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah



Narasumber, HS Tisnanta menjelaskan materi terkait Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan



Penyuluh Hukum Madya, M. Zuhri selaku moderator memimpin jalannya kegiatan



Nevey Varida, Peneliti Madya Balitbangkumham bergabung secara virtual melalui Aplikasi Zoom Meeting



Kewenangan dan Tata Kelola Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara

Oleh Erbit Septiawan

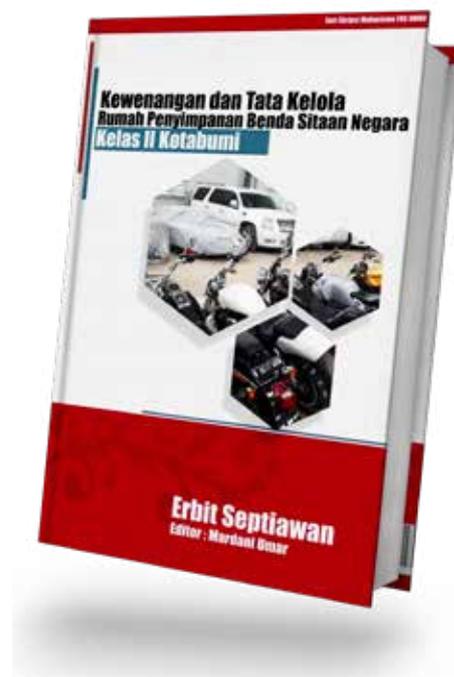
Negara sesungguhnya merupakan sebuah organisasi yang diciptakan oleh manusia (Human Creation) tentang ragam hubungan antar individu dalam aktifitas kehidupan bermasyarakat yang dikongsi sedemikian rupa untuk maksud melengkapi kepentingan dan mencapai maksud dan tujuan bersama. Dalam suatu pemerintahan, Negara harus menjamin adanya penguatan dalam pelaksanaan hukum dan tercapainya sebuah harapan, yaitu tujuan hukum. Dalam penegakan hukum, terdapat tiga komponen penting yang perlu mendapat atensi yaitu keadilan, kemanfaatan atau dampak serta kejelasan hukum.

Dalam penanganan suatu perkara pada tindak pidana di Indonesia, penyidik mengenal suatu tindakan penyitaan, yang dilakukan untuk mengambil secara paksa barang atau benda yang dikuasai oleh tersangka atau terdakwa untuk sementara waktu tanpa ganti rugi terlebih dahulu, barang atau benda tersebut digunakan pada proses peradilan, kemudian barang atau benda itu disebut sebagai benda sitaan Negara atau barang rampasan Negara. Benda sitaan Negara kemudian disebut sebagai Basan merupakan benda yang disita Negara untuk kebutuhan proses peradilan, adapun barang rampasan Negara atau Baran merupakan benda sitaan Negara yang berdasarkan vonis Pengadilan (inkracht) dirampas oleh Negara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHPidana pada Pasal 27 berisi tentang kewenangan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara sebagai zona penyimpanan dan pengelolaan atas benda sitaan Negara serta barang yang dirampas untuk Negara, baik yang disimpan pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara maupun di luar Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, maka setelah penyidik melakukan penyitaan, benda sitaan Negara tersebut wajib disimpan pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, hal ini sebagai upaya Negara untuk mengurangi resiko kerusakan atau kehilangan, serta menjaga mutu dan kuantitas terhadap benda sitaan Negara tersebut.

Selain itu dalam rangka menjamin kepastian hukum setiap warga Negeranya, pengelolaan benda sitaan Negara harus dilaksanakan penuh tanggung jawab, profesional, transparan dan akuntabel, hal ini juga bertujuan mengurangi resiko kerugian Negara, sebab pada saat benda sitaan Negara diputuskan oleh Hakim atau Pengadilan untuk dirampas oleh Negara atau dikembalikan kepada pemilik barang sebelum disita, maka benda sitaan Negara harus di serah terimakan kembali sesuai dengan kondisi awal ketika berada di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, buruknya pengelolaan benda sitaan Negara juga dapat menimbulkan permasalahan hukum baru terkait benda sitaan Negara yang hilang atau rusak tanpa disertai alasan yang sah



menurut peraturan dan perundang-undangan, sebuah sanksi dapat diberikan kepada petugas pengelola benda sitaan Negara yang merupakan Aparat Sipil Negara, baik berupa sanksi hukum pidana atau sanksi administrasi.

Pengelolaan benda sitaan Negara sendiri merupakan bagian dari aktivitas pengadministrasian yang dimulai dari penerimaan benda sitaan Negara hingga pengeluaran benda sitaan Negara, yang saat ini diatur pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, yang mengatur tentang petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan benda sitaan Negara perihal petunjuk serah terima, registrasi, pengklasifikasian, pe-

nempatan hingga saat pengeluaran benda sitaan Negara.

Kemudian berdasarkan Pasal 39 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, menentukan barang atau benda yang dimungkinkan untuk dilakukan penyitaan, antara lain adalah :

- a. Barang-barang yang dimiliki terpidana yang didapat karena kejahatan;
- b. Barang-barang yang dimiliki terpidana yang dengan sengaja telah dipakai untuk melakukan kejahatan.

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara bertugas mengelola benda sitaan Negara dengan cara melakukan:

- a. Penyimpanan;
- b. Pengamanan;
- c. Pemeliharaan; dan
- d. Penyelamatan.

Tugas pokok dan fungsi Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara antara lain :

Melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara dan menjalankan fungsi untuk

- e. Melaksanakan administrasi benda sitaan Negara dan benda rampasan Negara;
- f. Melakukan pemeliharaan dan pemutasian benda sitaan Negara dan barang rampasan Negara;
- g. Melakukan pengamanan dan pengelolaan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara;
- h. Melakukan kegiatan urusan tata usaha.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara dan Rampasan Negara antara lain:

1. Penerimaan Benda Sitaan Negara dan Rampasan Negara;
2. Penelitian dan Penilaian Benda Sitaan;
3. Pendaftaran Benda Sitaan dan Rampasan Negara;
4. Penyimpanan Benda Sitaan dan Rampasan Negara;
5. Pemeliharaan Benda Sitaan dan Rampasan Negara;
6. Pemutasian Benda Sitaan dan Rampasan Negara;
7. Pengeluaran atau Penghapusan dan Pemusnahan Benda Sitaan Negara;
8. Penyelamatan dan Pengamanan Benda Sitaan Negara;
9. Pelaporan Benda Sitaan dan Rampasan Negara.

Adapun faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan kewenangan pengelolaan benda sitaan Negara meliputi :

- a. Terbatasnya jumlah petugas pada bagian pengelolaan benda sitaan Negara dan minimnya pengetahuan petugas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, membuat banyak berkas penerimaan penitipan barang bukti yang terbengkalai dan kurang tersusun rapi.
- b. Kurangnya pengawasan melekat dari atasan langsung yang membuat koordinasi dan komunikasi antar petugas kurang baik, terutama pada hal penyimpanan dan pembuatan berkas penerimaan benda sitaan Negara, yang mengakibatkan terkendalanya tugas dan fungsi dalam pelaksanaan pelayanan perkantoran.
- c. belum memiliki petugas bersertifikat keahlian penelitian benda sitaan Negara.
- d. Terdapat benda sitaan Negara yang masih tersimpan diluar Rumah Penyimpanan benda sitaan Negara.
- e. Putusan pengadilan terhadap benda sitaan Negara dan barang rampasan Negara tidak diketahui oleh pihak Rumah Penyimpanan benda sitaan Negara
- f. Pelaksanaan eksekusi terhadap benda sitaan Negara dan barang rampasan Negara tidak tepat waktu yang mengakibatkan menurunnya nilai ekonomis benda sitaan Negara dan barang rampasan Negara.

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis ingin menyampaikan saran-saran sebagai berikut :

- a. Diharapkan pihak Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, dapat meningkatkan kerja sama yang baik dengan instansi penegak hukum lain guna memperkuat pelaksanaan kewenangan pengelolaan benda sitaan Negara terutama masih terdapat benda sitaan Negara yang masih tersimpan diluar Rumah Penyimpanan benda sitaan Negara,
- b. Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara agar dapat mengusulkan penambahan jumlah petugas yang kompeten dalam melaksanakan tugas dan fungsi terkait pengelolaan benda sitaan Negara;
- c. Mengusulkan petugas yang ada untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan terkait kepemilikan sertifikat keahlian penelitian benda sitaan Negara;
- d. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang saat ini bertugas agar dapat menjalankan tugasnya secara tertib, terarah, transparan dan akuntabel. •



Keluarga Besar Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Lampung
Mengucapkan

*Selamat Hari Raya Idul Fitri
1442 H*

MINAL AIDIN WAL FAIZIN
MOHON MAAF LAHIR DAN BATIN



PROTOKOL KESEHATAN NEW NORMAL

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/335/2020, dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19.

JAGA JARAK

Tetap memperhatikan jaga jarak (*physical distancing*) minimal 1 meter saat berhadapan dengan orang lain.



GUNAKAN MASKER

Saat berangkat dan pulang dari tempat kerja serta selama berada di tempat kerja. HINDARI tangan menyentuh area wajah seperti mata, hidung atau mulut.

CUCI TANGAN

Jaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, atau menggunakan hand sanitizer.



AYO! PAKAI MASKER

KENAKAN MASKER ANDA DEMI KEBAIKAN KITA BERSAMA

CEGAH PENYEBARAN COVID-19 DIMULAI DARI DIRI SENDIRI



DANAN PURNOMO
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENKUMHAM
LAMPUNG

Gunakan smartphone anda untuk memindai (scan) QR-Code berikut*



Atau klik tautan (link) di bawah
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
<http://bit.ly/tigaaskumhamlampung>

**BANTU KAMI MEMBENAHAI LAYANAN
DENGAN BERPARTISIPASI DALAM SURVEI
BERIKUT**

HASIL SURVEI KUALITAS PELAYANAN
PERIODE MARET 2021
DENGAN 113 RESPONDEN



Gunakan smartphone anda untuk memindai (scan) QR-Code berikut*



Atau klik tautan (link) di bawah
SURVEI KUALITAS PELAYANAN
<https://survei.balitbangham.go.id/ly/ROCP7k6H>